

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Hutan

Edisi : 22 Maret 2013
Halaman : 13

Kementerian LH Akan Kawal Investasi di Hutan

Aktivis Lingkungan Minta SK Menhut No 458/2012 Direvisi

Jayapura, Kompas - Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya berjanji akan mengawal penggunaan 800.000 hektar hutan di Papua untuk berbagai kepentingan investasi. Kawasan hutan yang melingkupi 90 persen daratan Papua merupakan salah satu paru-paru dunia yang tersisa.

"Pengalihan fungsi hutan harus dilakukan hati-hati karena bisa berdampak besar seperti banjir dan longsor. Kami memiliki instrumen untuk melakukan kontrol seperti kajian lingkungan hidup strategis, izin lingkungan, dan amdal," kata Balthasar seusai membuka Rapat Koordinasi Ekoregion Papua, Kamis (21/3), di Jayapura.

Balthazar meminta pemerintah daerah memastikan investor memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Langkah itu penting sebagai upaya melestarikan keragaman hayati di Papua.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia mengeluarkan analisis atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 458 Tahun 2012 yang menyetujui perubahan fungsi kawasan hutan menjadi nonhutan (376.385 hektar), antarfungsi kawasan hutan (hutan lindung/konservasi menjadi hutan produksi 395.176 ha), dan area nonhutan menjadi hutan (45.258 ha) (Kompas, 15/3).

Hal itu didasarkan permintaan Gubernur Papua untuk merevisi rencana tata ruang wilayah. Aktivis lingkungan menilai, ini akal-akalan untuk menyambut moratorium izin baru kehutanan yang berakhir 20 Mei 2013.

Kemhutan membantah dan berdalih penerbitan SK Menhut No 458/2012 didasarkan hasil rekomendasi tim terpadu. Sebagian pelepasan kawasan hutan disebabkan kondisi di lapangan. Lahan telah menjadi area permukiman atau infrastruktur sosial.

Namun, sebagian hutan lindung telah diubah menjadi hutan produksi yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan atau tambang. Balthasar menyatakan, investasi perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sekarang diupayakan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, namun lingkungan terjaga," kata mantan Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura ini.

Ia menyatakan, hutan menyimpan potensi besar karena memiliki keragaman hayati sangat tinggi dan belum terungkap seluruhnya. "Kita sedang proses ratifikasi Protokol Nagoya yang akan mengatur dan memastikan pembagian keuntungan pemanfaatan keragaman hayati (dan pengetahuan tradisional) bagi masyarakat sekitar hutan" katanya.

Dalam konferensi pers, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Elia Loupatty mengatakan, akan mengoordinasikan perubahan kawasan hutan dengan Kementerian Kehutanan.

Teguh Surya, Pengampanye Politik Hutan Greenpeace Indonesia, menyesalkan Balthasar. "Harusnya Menteri Lingkungan Hidup minta SK No 458/2012 direvisi karena tidak sejalan dengan UU No 32/2009 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)," ujarnya.

Deforestasi legal melalui SK Menhut dinilai berlawanan dengan komitmen Presiden Yudhoyono untuk menurunkan emisi 26-41 persen tahun 2020. Deforestasi dan degradasi hutan/ gambut berperan paling besar dalam pelepasan emisi di Indonesia. (ICH/JOS)